

B A B I

P E N D A H U L U A N

Masa tahun 1957-1965, peranan Demokrasi Indonesia bukan saja menurun tetapi hampir saja berganti menjadi diktator.¹ Statemen diatas dapat dilihat dalam pengaduan Bung Tomo sebagai wakil Presiden Republik Indonesia kepada Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 22 Juli 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadukan Kabinet yang dipimpin oleh Dr. Ir. Soekarno atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kabinet tersebut terhadap Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dengan tindakan-tindakan Kabinet tersebut membubarkan parlemen Republik Indonesia hasil pemilihan Rakyat..... selanjutnya Bung Tomo mengadukan Kabinet bertindak sewenag-wenang dengan mengemukakan beberapa fakta antara lain :

- a. Paksaan untuk menerima Manipol USDEK, tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
- b. Paksaan supaya diadakan kerjassama antara Nasionalis-Agama dan Komunis.
- c. Paksaan pembongkaran tugu Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Jakarta.²

Berdasarkan beberapa fakta diatas Bung Hata menyebut Demokrasi Terpimpin adalah suatu yang diktator.³ Ter-

¹ Deliar Noer, Partai Politik di Pentas Nasional, Grafiti Peres, Jakarta, Cet. Pertama, 1987, hal. 349.

² Hilliam H. Frederik dan Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi, LP3ES, Jakarta, Cet. Kedua, 1984, hal. 386.

³ Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, t. t., hal. 149.

utama setelah berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959, masa ini mencatat bangkit dan berkembangnya suatu pemerintahan otokrasi yang menumpas tanpa segan oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya.⁴ Bahkan pada sisi lain Soekarno berusaha mengurangi peranan kekuatan yang dipandang akan menghambat cita-citanya dan memenjarakan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh dalam masyarakat, sebab dengan cara ini Presiden Soekarno akan aman dalam membawakan misinya.⁵ Sistem ini disebut secara populer Demokrasi Terpimpin, nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno sendiri, sistem yang menurut dia sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tanah air.⁶

Dengan sistem inilah Presiden Soekarno selalu mengumandangkan hasil-hasil penemuan yang disebut dengan "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Sebagaimana yang dikatakan dalam menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 14, bahwa tahun 1959 menduduki tempat yang paling unik, ada tahun yang dikatakan tahun ketentuan, ada tahun yang dikatakan tahun tantangan, tetapi tahun 1959 adalah tahun "Rediscovery of our Revolution".⁷

⁴Deliar Noer, Op. Cit., hal. 349.

⁵M. Rusli Karim, Op. Cit., hal. 151.

⁶Deliar Noer, Loc. Cit., hal. 149.

⁷Maj. Moch. Said, Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, Surabaya, 1963, hal. 151.

A. Penegasan Judul.

Untuk menghindari salah pengertian dari judul sekripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul sebagai berikut :

Nahdlatul Ulama' : Suatu organisasi yang sering - disebut jam'iyah bagi umat Islam, didirikan oleh para Ulama' pada tahun 1926 di Surabaya. - Sejak tahun 1952 sampai tahun 1973 telah menjadi partai politik yang berdasarkan agama Islam dengan berpegang teguh pada salah satu madzhab empat Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.¹¹

Dalam : Merupakan kata depan yang menghubungkan sebelum dan sesudah kata "Nahdlatul Ulama'"¹² yang berarti didalam, berada didalam¹³

¹¹ Hasan Shadely, Ensiklopedi Indonesia, Ihtiar Baru Van Hoev, Jakarta, 1984, hal 2327

¹² Gorys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, Nusa Indah Cet VII, 1980, hal. 80.

¹³ Yulius S. Et. D. Kamus Baru Bahasa Indonesia, Cet, II, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, hal.54.

Akan tetapi secara resmi periode Demokrasi Terpimpin bermula sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit itu menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950, yang dinyatakan telah habis masa berlakunya. Juga melalui Majelis Konstituante yang dibentuk tahun 1956 dinyatakan bubar karena ketidak mampuan Majelis ini merampungkan tugasnya, terutama dalam menentukan dasar Pancasila atau dasar Islam.⁸

Dalam situasi yang demikian partai-partai Islam pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai ini menentang ide Demokrasi Terpimpin dan akibatnya partai ini diperintahkan bubar pada akhir tahun 1960, sedang kelompok kedua terdiri dari Nahdlatul Ulama' (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang memihak kepada Soekarno dan mendukung Demokrasi Terpimpin.⁹

Dalam menghadapi rejim Soekarno ini NU tidak berani menentang, tetapi NU berada dalam posisi devensif, walaupun NU secara prinsipil seharusnya ia tidak dapat menyetujui politik Soekarno yang menguntungkan PKI namun

⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Cet. Pertama, 1988, IAIN Sunan Kalijogo, Pres, hal. 2.

⁹ Ibid, hal. 3.

secara formal partai Nahdlatul Ulama' tidak berani karena khawatir ditindak oleh Bung Karno dan dibubarkan.

Partai Nahdlatul Ulama' tidak berani menyatakan pendiriannya karena resikonya terlalu berat, yaitu NU akan dipencilkan sama sekali dari gelanggang politik bahkan bisa berakibat pembubaran bagi partai Nahdlatul Ulama' itu sendiri.¹⁰

10

A. Chalid Mewardi, Pratice Politica Nahdlatul Ulama' Mendayung di Tengah Gelombang, Jakarta, dan Surabaya, hal. 39

E r a : Jaman/masa.¹⁴

Demokrasi Terpimpin : Sisti demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk - yang tertentu.¹⁵ Atau Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedang dalam kesempatan yang lain Soekarno menjelaskan, Demokrasi Terpimpin - adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarhinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.¹⁶

Jadi bisa ditarik secara tegas bahwa yang dimaksud dari judul diatas adalah keberadaan serta peranan Nahdlatul Ulama' sebagai partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

B. Alasan Memilih Judul.

Adapun alasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwasanyasecara resmi pereode Demokrasi Terpimpin-bermula dengan dikeluarkannya Dekrit ... Persiden

¹⁴I b i d, hal. 54.

¹⁵Wjs. Poerwodarminta, Kamus Umum Indonesia, Cet,- II, PN. Balai Pustaka, 1984, hal. 54.

¹⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, Op. Cit., hal. 183.

Soekarno 5 Juli 1959. Dekrit itu menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUDS yang dinyatakan telah habis masa berlakunya. Juga mulai Dekrit itu Majelis konstituante yang dibentuk pada tahun 1956 dinyatakan bubar atas dasar ketidakmampuan Majelis ini merampungkan tugasnya, terutama dalam hal menentukan dan menetapkan dasar pancasila atau dasar Islam. Kenapa hal ini terjadi? maka hal inilah yang menarik untuk dibahas.

2. Bila ditengok dari sisi yang lain, dekrit itu sendiri melapangkan jalannya Soekarno untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin yang pertama kali dilontarkannya pada 1957. Sikap partai-partai Islam menentang gerak Soekarno tetapi segera setelah dekrit, hal ini juga menyertai Demokrasi Terpimpin, mengapa? hal ini juga menarik untuk dibahas.
3. Diantara partai-partai Islam yang turut dalam sistem politik baru diciptakan Soekarno, NU harus dicatat sebagai yang terpenting untuk dibicarakan karna partai inilah yang muncul sebagai partai Islam terbesar setelah Masyumi menghilang.

Itulah hal-hal yang menarik penulis untuk membahas keberadaan NU pada masa Demokrasi Terpimpin. Dan disamping itu pula sepanjang pengetahuan penulis belum ada mahasiswa yang membahas NU secara khusus dalam kaitannya dengan Demokrasi Terpimpin. Sehingga

penulis membuat judul NU dalam Era Demokrasi Terpimpin.

C. Lingkup Pembahasan Dan Rumusan Masalah.

1. Lingkup Pembahasan.

- a. Latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin.
- b. Keberadaan NU selama Demokrasi Terpimpin.
- c. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
- d. Langkah-langkah yang ditempuh NU selama Demokrasi Terpimpin.

2. Rumusan Masalah.

- a. Mengapa NU yang pada waktu itu merupakan partai Islam terbesar mau mengikuti perjalanan Soekarno dan mendukung pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
- b. Bagaimana NU dalam menentukan sikap politiknya selama periode Demokrasi Terpimpin.
- c. Apakah yang dicapai oleh NU selama masa demokrasi Terpimpin.
- d. Sejauh manakah peranan NU dalam mengikuti langkah-langkah Soekarno selama Demokrasi Terpimpin.

D. Tujuan Penulisan.

Setelah diuraikan dan diungkapkan alasan-alasan penegasan judul dan ruang lingkup pembahasan diatas tujuan sekripsi ini adalah :

- a. Berusaha untuk mengetahui segi positif dan negatif NU dalam sistim pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
- b. Berusaha untuk mengungkapkan mengapa kehidupan partai politik Islam hanya NU yang mempunyai animo sangat besar dan dukungan oleh umat Islam justru mendukung pemerintahan Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin.
- c. Dengan mengetahui sistim pemerintahan pada masa - Demokrasi Terpimpin yang dipegang Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan sekaligus - sesepuh yang akibatnya terjadi pemberontakan G. 30 S. PKI 1965 yang akan menghancurkan bangsa Indone - sia, maka kita akan lebih waspada dan berpengalaman terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh dalam orde baru ini.

E. Mitode Penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini mitode yang dipa - kai adalah sebagai berikut :

1. Heuristik yakni kegiatan menghimpun jejak- jejak masa lalu.¹⁷ Maksudnya kegiatan mengumpulkan data- data yang ada hubungannya dengan skripsi ini dari sumbernya. Yakni dalam pembahasan skripsi ini di- gunakan sumberdata kepustakaan (literatur) yaitu

¹⁷ Nugroho Noto Susanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Yayasan Idayu, Jakarta, 1984, hal. 36.

mengambil data dari berbagai buku dan mejalah serta dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan sekripsi ini.

2. Pengumpulan data dan pengelompokannya ; yaitu untuk memperoleh fakta yang falit dan sesuai dengan penulisan sekripsi ini, maka data-data itu diolah melalui :
 - a. Seleksi data ; yaitu memilih data yang dianggap relevan dan sesuai dengan penulisan sekripsi ini
 - b. Komperatif ; yaitu mengadakan perbandingan terhadap beberapa data kemudian ditarik suatu kesimpulan.
3. Interpretasi ; yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta yang diperoleh.
4. Historiografi ; yaitu suatu langkah menerangkan-fakta-fakta menjadi kisah sejarah.¹⁸ atau disajikan dalam bentuk tulisan dengan metode :
 - Informasi diskriptip ; yaitu suatu polah penyajian yang dikemukakan sedemikian rupa selaras dengan kenyataan yang ada.
 - Analisis diskriptip ; yaitu suatu polah penyajian dengan cara mengumpulkan keterangan melalui beberapa analisis.

¹⁸I b i d, h a l.36

F. Sistimatika Penulisan.

Untuk memudahkan penyusunan dan penggambaran isi dari skripsi ini, maka pembahasannya dipaparkan dalam bentuk pembagian bab, dan kemufian tiap-tiap bab diklasifikasi dalam bentuk fasal-fasal.

Bab I tentang pendahuluan yang berisi didalamnya tentang penegasan judul, alasan memilih judul, lingkup pembahasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistimatika penulisan.

Bab II Tinjauan tentang NU sebagai partai politik Islam, dalam bab ini merupakan uraian teoritis NU yang berisi tentang karakteristik NU serta peranannya dan selama NU menjadi partai politik sampai dengan selainya pemilihan umum 1955. Dengan mengetahui karakteristik serta peranan NU maka akan lebih menambah jelas terhadap pembahasan skripsi ini.

Bab III Demokrasi Terpimpin. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang perjalanan Demokrasi Terpimpin yang meliputi latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Bab IV merupakan bab inti pembahasan dari penyusunan skripsi ini, yaitu NU menghadapi Demokrasi Terpimpin yang meliputi strategi NU dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin, langkah-langkah NU dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin.

Bab V adalah merupakan bab yang terakhir dari sekripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.